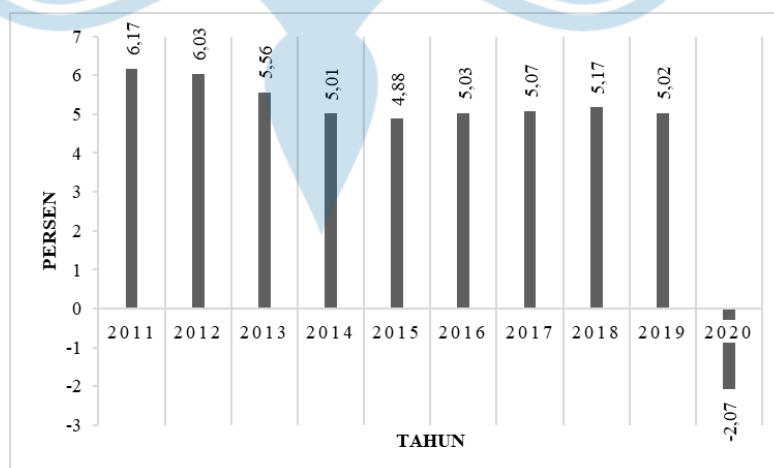


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

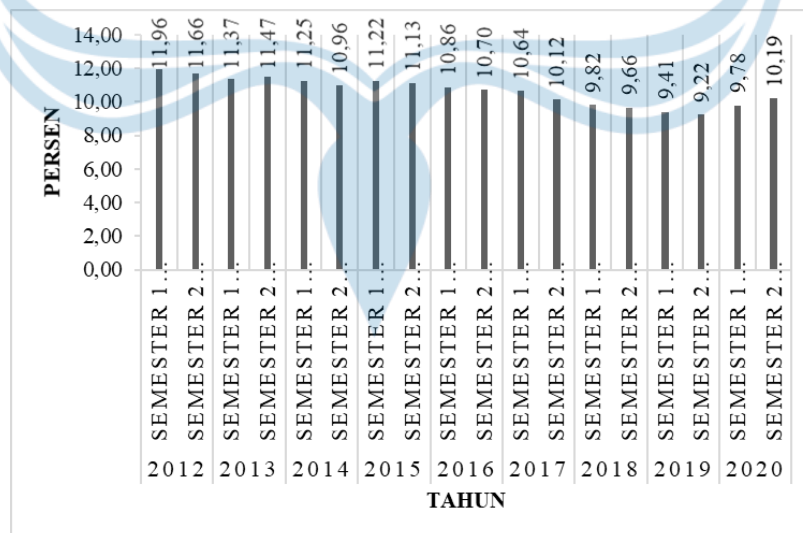
Bank Dunia menyatakan bahwa sesuai krisis moneter pada tahun 1997/1998 di Asia, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan (World Bank, 2021). Gambar 1.1 menyajikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2019. Sepanjang periode tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5 persen. Persentase pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu pada tahun 2011 sebesar 6,17 persen dan terendah tahun 2020 sebesar minus 2,07 persen. Stabilitas perekonomian Indonesia merupakan hasil dari perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang 20 tahun yang dimulai dari tahun 2005 dan akan berakhir pada tahun 2025 (World Bank, 2021). Lalu, faktor yang menjadi penyebab terjadinya penurunan pada tahun 2020 yaitu pandemi Covid-19 yang menimpa semua negara di dunia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2020 (Persen)

Pertumbuhan ekonomi dan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mempublikasikan persentase penduduk miskin setiap bulan Maret dan September. Gambar 1.2 menyajikan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2020. Persentase penduduk miskin di Indonesia secara garis besar mengalami penurunan dari bulan Maret 2012 yang sebesar 11,96 persen menjadi 9,22 persen pada bulan September 2019, atau mengalami penurunan sebesar 2,74 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi yaitu bulan September tahun 2013 sebesar 11,47 persen dan terendah pada bulan September 2019 sebesar 9,22 persen. Namun, dikarenakan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,19 persen dan membuat kondisi persentase penduduk miskin mundur seperti kondisi 3 tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 10,12 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.2
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020 (Persen)

Bank Dunia dalam situs resminya menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2018). Inklusi keuangan memiliki makna yakni masyarakat sebagai individu dan bisnis memiliki akses ke produk dan layanan keuangan dalam memenuhi kebutuhannya seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Akses keuangan memfasilitasi kehidupan sehari-hari masyarakat dalam merencanakan tujuan jangka panjang hingga keadaan darurat. Salah satu langkah awal yaitu dengan pembuatan rekening atau akun transaksi yang memungkinkan masyarakat untuk menyimpan, mengirim, dan menerima uang. Selanjutnya masyarakat dapat memperluas usahanya, berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, dan mengelola risiko, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan bisnis (World Bank, 2018).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses pada berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, lancar dan tepat waktu, serta aman bagi masyarakat, sehingga biaya yang dikeluarkan terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelompok masyarakat yang menjadi prioritas untuk mendapat akses keuangan di Indonesia yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah, penduduk daerah tertinggal, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pekerja migran, wanita, disabilitas, anak terlantar, lansia, serta pelajar dan pemuda. Keuangan inklusif dapat

menciptakan stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, yang selanjutnya menjadi pendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antardaerah. Dikarenakan hal tersebut keuangan inklusif menjadi komponen yang penting dalam sebuah proses inklusi sosial serta inklusi ekonomi.

Bank Indonesia mempublikasikan Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia (SSKI) yang salah satu isinya yaitu data indikator keuangan inklusif Indonesia. Bank Indonesia menggunakan komponen-komponen indikator keuangan inklusif sebagai berikut (Bank Indonesia, Tanpa Tahun):

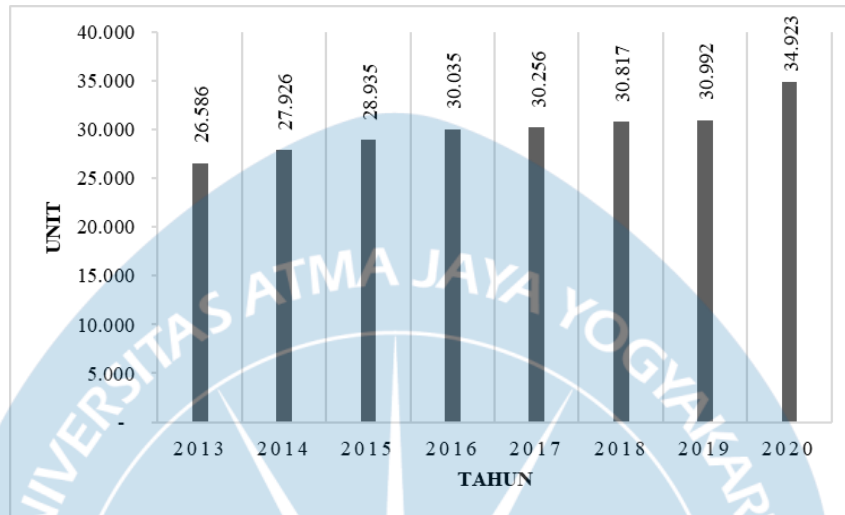
- 1) Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan terhadap PDB Harga Berlaku.
- 2) Kredit Perbankan terhadap PDB Harga Berlaku.
- 3) Jumlah Kantor Layanan Bank per 100 ribu Penduduk Dewasa.
- 4) Jumlah Mesin *Automated Teller Machine* (ATM) per 100 ribu Penduduk Dewasa.
- 5) Jumlah Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) per 100 ribu Penduduk Dewasa.
- 6) Jumlah Kantor Layanan Bank per 1.000 km².
- 7) Jumlah Mesin ATM per 1.000 km².
- 8) Jumlah Agen LKD per 1.000 km².
- 9) Jumlah Rekening DPK Perbankan per 1.000 Penduduk Dewasa.
- 10) Jumlah Rekening Kredit Perbankan per 1.000 Penduduk Dewasa.
- 11) Jumlah Rekening Kredit UMKM Perbankan per 1.000 Penduduk Dewasa.
- 12) Jumlah Uang Elektronik per 1.000 Penduduk Dewasa.

- 13) Jumlah Rekening Uang Elektronik Register pada Agen LKD per 1.000 Penduduk Dewasa.
- 14) Jumlah Kantor Layanan Bank.
- 15) Jumlah Mesin ATM.
- 16) Jumlah Agen LKD.
- 17) Jumlah Rekening Uang Elektronik Register pada Agen LKD.
- 18) Jumlah Rekening DPK Perbankan.
- 19) Jumlah Rekening Kredit Perbankan.
- 20) Jumlah Rekening Kredit UMKM.

Bank Indonesia membagi wilayah di Indonesia menjadi enam pulau yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua. Beberapa komponen yang memiliki data wilayah yaitu komponen pada poin 3 sampai 8 dan poin 13 sampai 17. Untuk komponen poin 1, 2, 9 sampai 12 dan poin 18 sampai 20 menggunakan data nasional Indonesia. Data yang tersedia yaitu dari tahun 2013 hingga 2021 bulan Januari.

Gambar 1.3 menyajikan jumlah kantor layanan bank di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Kondisi jumlah kantor layanan bank di Indonesia selalu mengalami peningkatan, dari tahun 2013 yang berjumlah 26.586 unit menjadi 34.923 unit pada tahun 2020 atau bertambah 8.337 unit. Hal ini menunjukkan adanya perluasan jangkauan perbankan di Indonesia melalui penambahan jumlah kantor layanan bank. Penambahan jumlah kantor layanan bank merupakan upaya bank agar masyarakat dapat lebih dekat dan mudah dalam mengakses layanan perbankan,

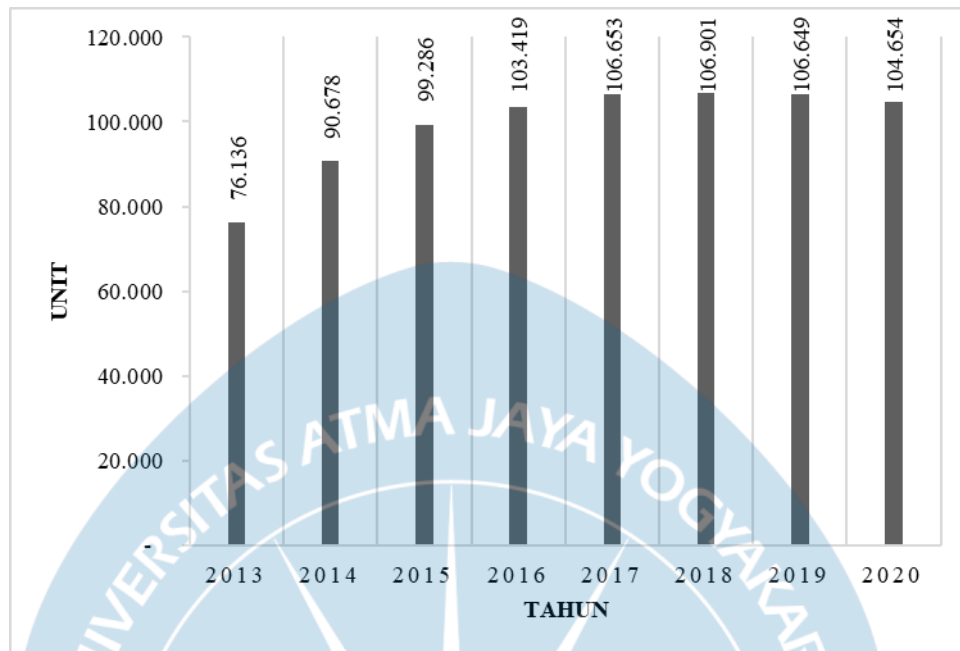
serta dapat juga menambah jumlah pengguna atau nasabah yang memiliki tempat tinggal di dekat lokasi kantor layanan bank.



Sumber: Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 1.3
Jumlah Kantor Layanan Bank di Indonesia Tahun 2013-2020 (Unit)

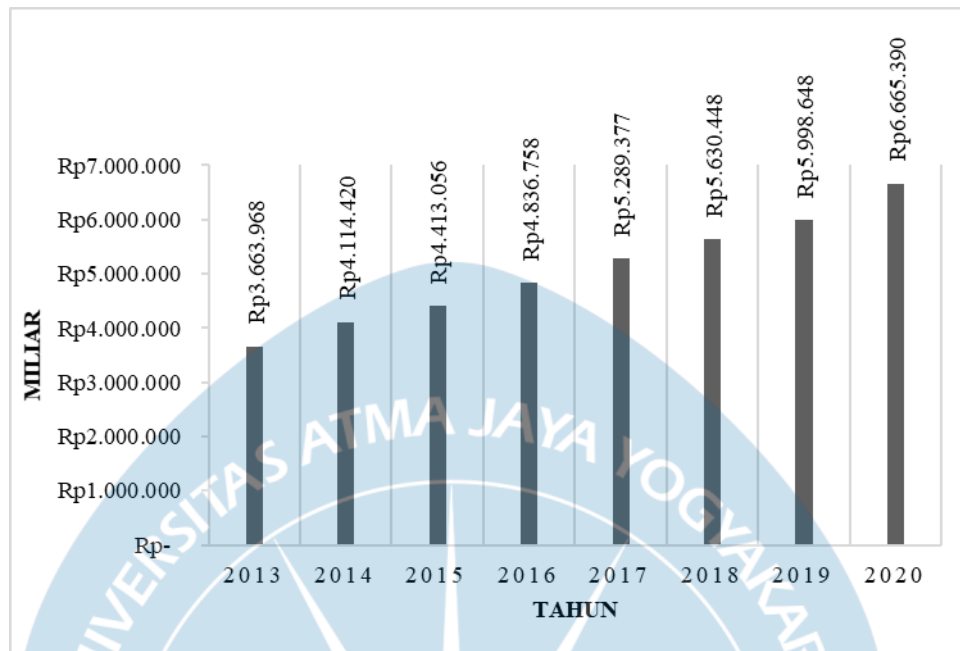
Selanjutnya Gambar 1.4 menyajikan jumlah ATM di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Kondisi jumlah ATM di Indonesia mengalami peningkatan, dari tahun 2013 yang berjumlah 76.136 unit menjadi 104.654 unit pada tahun 2020 atau bertambah 28.518 unit. Namun, pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah ATM mulai mengalami pengurangan 252 unit dan tahun 2019 ke tahun 2020 berkurang 1.995 unit. Secara garis besar, penambahan jumlah ATM pada tahun 2013 hingga tahun 2018 menunjukkan adanya perluasan jangkauan pengguna ATM di Indonesia. Penambahan jumlah ATM merupakan upaya bank agar pengguna layanan bank atau nasabah lebih mudah untuk mendapatkan layanan bank seperti penarikan uang, setoran tunai ke rekening, melakukan transfer antar rekening, hingga pembayaran atau pengisian saldo dompet digital.



Sumber: Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 1.4
Jumlah Mesin ATM di Indonesia Tahun 2013-2020 (Unit)

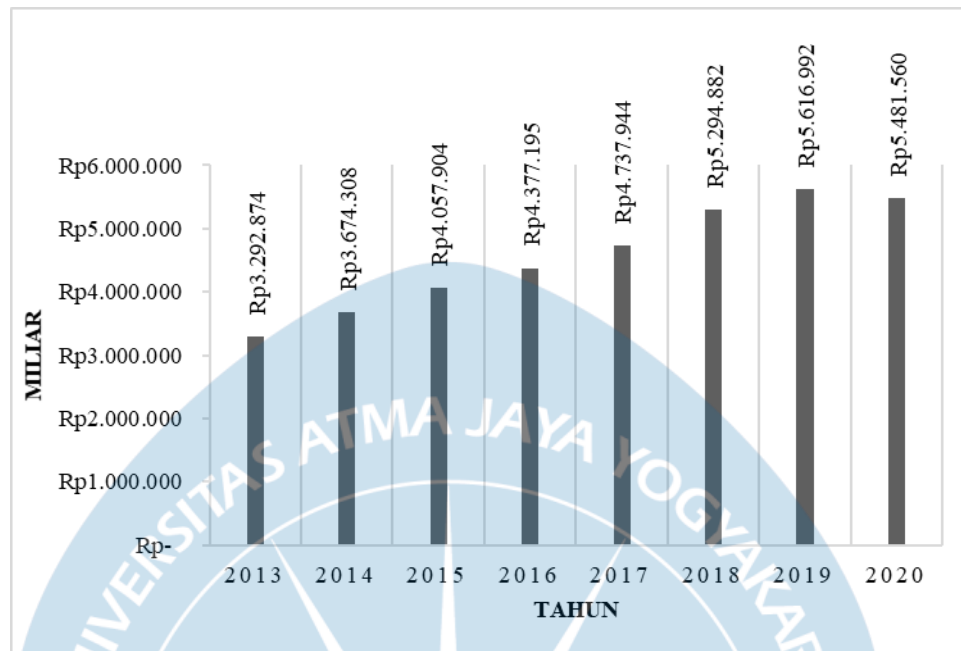
Selanjutnya Gambar 1.5 menyajikan jumlah penghimpunan DPK bank umum di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Kondisi jumlah penghimpunan DPK bank umum selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang berjumlah 2.784.912 miliar rupiah menjadi 6.665.390 miliar rupiah pada tahun 2020 atau bertambah 3.880.478 miliar rupiah. Kenaikan jumlah DPK bank umum berkisar 139 persen yang menunjukkan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mempercayakan bank untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito, giro, tabungan, dan atau bentuk yang dipersamakan dengan itu.



Sumber: SPI Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Gambar 1.5
Jumlah Penghimpunan DPK Bank Umum di Indonesia Tahun 2011-2020
(Miliar)

Selanjutnya Gambar 1.6 menyajikan jumlah penyaluran kredit bank umum kepada pihak ketiga bukan bank di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Kondisi jumlah penyaluran kredit bank umum kepada pihak ketiga bukan bank mengalami peningkatan, dari tahun 2011 yang berjumlah 2.200.094 miliar rupiah menjadi 5.616.992 miliar rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5.481.560 miliar rupiah. Secara keseluruhan dari tahun 2011 hingga tahun 2020 kenaikan jumlah penyaluran kredit bank umum kepada pihak ketiga bukan bank berkisar 149 persen yang menunjukkan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang memanfaatkan kredit baik untuk tambahan dalam membiayai kebutuhan modal kerja, pengadaan barang modal jangka panjang, ataupun untuk pengadaan barang atau jasa dengan tujuan konsumsi.



Sumber: SPI Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

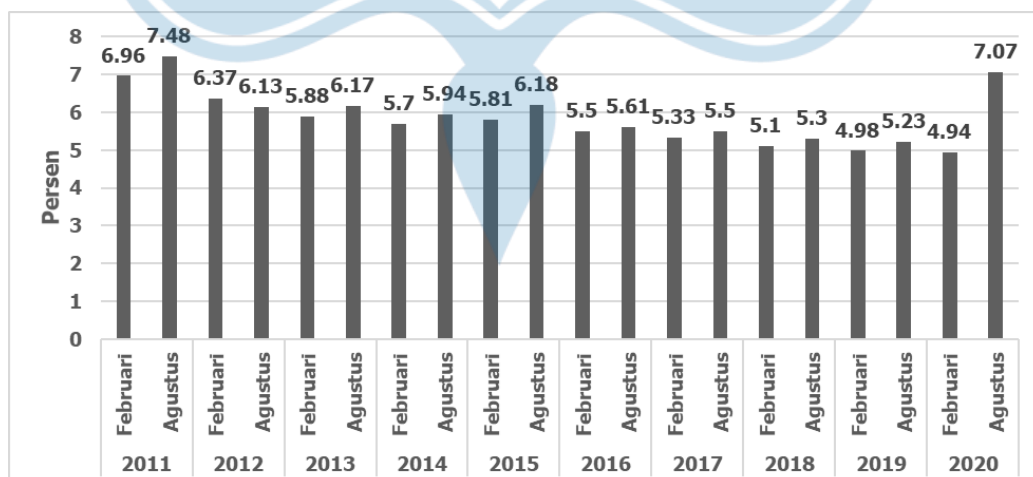
Gambar 1.6
Jumlah Penyaluran Kredit Bank Umum Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank di Indonesia Tahun 2011-2020 (Miliar)

Ketidakkampuan masyarakat untuk mencapai standar taraf hidup minimum atau memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya dikarenakan ketidakmampuan untuk memiliki pendapatan atau pekerjaan yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah serta akses untuk mendapatkan penghasilan dari lapangan pekerjaan atau kemampuan untuk bekerja secara mandiri yang rendah. Hal ini menjadikan banyaknya masyarakat yang tergolong miskin memiliki kualifikasi yang rendah untuk memiliki pendapatan atau pekerjaan yang layak, sehingga menjadi pengangguran.

Pengangguran (*Unemployment*) atau di Indonesia didefinisikan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu semua penduduk usia kerja yang pada suatu referensi waktu tidak punya pekerjaan (*without work*), sudah mempunyai

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*currently available for work*), dan sedang mencari pekerjaan (*seeking work*). Namun demikian, definisi dan ruang lingkup pengangguran di setiap negara bisa berbeda-beda karena batasan usia kerja, kriteria sedang mencari pekerjaan, dan lain-lain (Badan Pusat Statistik, 2007: 16). Dalam BPS indikator TPT merupakan persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Gambar 1.7 menyajikan kondisi TPT di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Gambar tersebut menjelaskan bahwa TPT pada bulan Februari tahun 2011 yaitu sebesar 6,96 persen mengalami penurunan hingga bulan Februari tahun 2020 menjadi 4,94 persen. Namun, TPT pada bulan Agustus tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,07 persen. Penyebab hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang menjadikan kondisi tingkat pengangguran terbuka mundur kembali seperti kondisi 9 tahun sebelumnya, yang mana TPT pada bulan Februari tahun 2011 yaitu 6,96 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.7
TPT di Indonesia Tahun 2011-2020 (Persen)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap persentase penduduk miskin. Variabel inklusi keuangan diadaptasi dari indikator inklusi keuangan pada publikasi SSKI Bank Indonesia. Oleh karena itu variabel inklusi keuangan yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rasio Kantor Layanan Bank yang merupakan jumlah kantor layanan bank per 100 ribu penduduk dewasa.
- 2) Rasio ATM yang merupakan jumlah ATM per 100 ribu penduduk dewasa.
- 3) Persentase DPK yang merupakan persentase jumlah DPK per Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 4) Persentase kredit yang merupakan persentase jumlah kredit per PDRB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Rasio Kantor Layanan Bank terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020?
- 2) Bagaimana pengaruh Rasio *Automated Teller Machine* terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020?
- 3) Bagaimana pengaruh Persentase Dana Pihak Ketiga terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020?
- 4) Bagaimana pengaruh Persentase Kredit terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020?

- 5) Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kantor Layanan Bank terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Automated Teller Machine* terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kredit terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor keuangan, pengentasan kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

- 2) Instansi-instansi terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran kondisi sektor keuangan terutama perbankan sehingga dapat menunjukkan peran sektor keuangan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap sektor keuangan di Indonesia.
- 3) Peneliti / Pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kondisi inklusi keuangan, penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, serta wujud dari sumbangan pemikiran bagi kepentingan penulisan ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari kondisi ekonomi, kemiskinan, inklusi keuangan, dan pengangguran di Indonesia, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan landasan teori tentang kemiskinan, inklusi keuangan, tenaga kerja dan pengangguran. Selain itu pada bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menyajikan objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran variabel penelitian, serta alat dan model analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

